

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menjadi landasan utama pada pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah yang diharapkan dalam pembangunan daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah akan berdampak pada kinerja keuangan daerah. Kinerja pemerintah yang dimaksud merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dan menggunakan dana dalam melakukan pembangunan daerah yang bersangkutan.²

Otonomi daerah pada jaman sekarang ini penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), Pemerintah mengupayakan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif,

² Hendra Sudrajat, Ja'far Amin, dkk, "*Otonomi Daerah dan Good Governance*", (Sura Mandiri Persada, 2024), hal. 58

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan.³

Otonomi dalam desentralisasi mewajibkan masing-masing wilayah untuk mengatur APBD bermaksud menyerasikan strategi ekonomi serta kapasitas yang tersaji hingga dalam mendistribusikannya sinkron dengan strategi pemerintah dengan tepat. Secara mandiri pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan supaya pelaksanaan pembangunan mampu dirampungkan dan tidak perlu menunggu dana pusat.⁴ Maka dari itu pentingnya penyajian laporan keuangan dengan pengelolaan keuangan yang efektif sebagai pengukuran kinerja keuangan serta upaya transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Peran pengukuran kinerja keuangan menjadi cerminan sebagai penilaian dengan adanya kinerja keuangan di daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.⁵

Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam menggunakan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan. Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Pemerintah membutuhkan tolak ukur dengan menggunakan kinerja keuangan untuk mencapai good governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Pengukuran kinerja

³ Hendra Kariangga, *“Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Politik”*, Cetakan Pertama, (Depok: Kencana, 2017), hal. 57

⁴ Syamsuddin Haris, *“Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah”*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hal. 10

⁵ Rina Yuliasuty Asmara, Ratri Paramitralaksmi, dkk, *“Akuntansi Pemerintah: Teori dan Penerapan”*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2024), hal. 22

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya dengan baik , serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.⁶

Kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam kinerja keuangan. Dengan demikian, pencapaian terhadap hasil kerja pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Apabila dalam pengelolaan keuangan daerah itu dilakukan secara efektif, maka menunjukkan bahwa kinerja keuangannya baik. Analisis terhadap kinerja keuangan bertujuan untuk melakukan pengukuran serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah, potensi daerah, kondisi keuangan, serta memastikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dalam melaksanakan kebijakan terkait anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.⁷

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Dari sekian banyak komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD diyakini bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh rencana anggaran, dengan alasan yaitu semakin banyak rencana anggaran

⁶ Mardiasmo, "*Akuntansi Sektor Publik*", (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hal. 123

⁷ Dasril Munir, dkk, "*Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*", (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004), hal. 43

semakin tinggi pula produktivitas perekonomian dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayanan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam bentuk rencana anggaran belanja tersebut. Sehingga pemerintah daerah secara terus-menerus dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangannya.⁸

Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia dengan tingkat pertumbuhan setara dengan tingkat nasional dan provinsi – provinsi besar lainnya di Jawa. Jawa Timur juga dikenal sebagai pusat industri dan keuangan kawasan Timur Indonesia. Tiga sektor lapangan usaha utama penopang PDRB Jawa Timur secara berturut-turut adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Secara geografis, Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan karena letaknya yang strategis, berbagai objek wisata yang ditawarkan mulai dari gunung, pantai, gua hingga air terjun yang hampir terdapat pada setiap kota di Jawa Timur.⁹

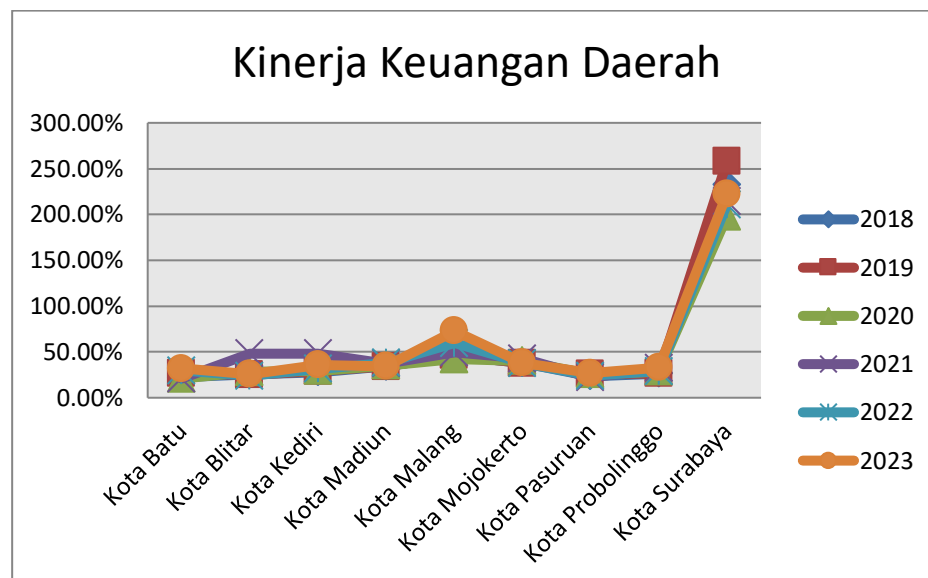
Dengan potensi yang dimiliki oleh provinsi Jawa Timur, apabila pemerintah mampu menggali potensi-potensi tersebut maka dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan hal ini dapat menunjukkan kinerja keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu, potensi tersebut secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan atas

⁸ Kamilaus Konstante Oki, “*Otonomi dan Kinerja Pemerintah Daerah*”, (Majalengka: PT. Pusat Literasi Dunia, 2023), hal. 117

⁹ Jatimprov.go.id

kinerja keuangan daerah. Kemampuan tiap wilayah dalam mengemban dan merealisasikan otonomi daerah dapat dinilai berdasarkan rasio pengukuran kinerja keuangan yang dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah. Dalam penelitian ini menggunakan rasio kemandirian dan mengambil sampel 9 kota di Provinsi Jawa Timur. Dibawah ini merupakan data Kinerja Keuangan Daerah diukur dengan rasio kemandirian daerah:

Grafik 1.1. Data Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Di Jawa Timur diukur dengan Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), (Data Diolah Penulis, 2024)

Berdasarkan angka rasio kemandirian di atas dapat ditarik analisis meliputi: Angka kemandirian pemerintah daerah pada tujuh Kota Provinsi Jawa Timur masih tergolong rendah terlihat dari besarnya nominal bantuan dan pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi, Kapasitas tujuh Kota Provinsi Jawa Timur masih rendah untuk menjelajahi potensi yang dimiliki daerahnya untuk meningkatkan PAD yang terlihat dari bantuan dan

pinjaman lebih besar daripada PAD, hanya Kota Malang masih termasuk ke dalam kategori sedang dan untuk Kota Surabaya sudah termasuk kategori tinggi untuk rasio kemandiriannya. Ketimpangan ketergantungan antar Kota Provinsi Jawa Timur cukup signifikan. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan daerah karena daerah masih bergantung dari anggaran pemerintah pusat dibandingkan mengoptimalkan PAD yang terlihat dari besarnya nominal dana transfer.

Menurut Abdul Halim dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengatur keuangan daerahnya.¹⁰ Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD. Hasil dari perhitungan analisis rasio yang dilakukan pada APBD, selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.¹¹

PAD merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya

¹⁰ Abdul Halim, “*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*”, Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 233

¹¹ Ihyahul Ulum, “*Audit Sektor Publik*”, (Jakarta: PT. Bumi AKsara, 2009), hal. 19-21

sendiri dengan optimal sehingga daerah tersebut akan memperoleh sumber penerimaan yang berasal dari daerah mereka sendiri yaitu Pendapatan Daerah (PAD). PAD suatu daerah akan menunjukkan tingkat kemandiriannya dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat menggunakan sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Apabila PAD suatu daerah lebih besar dari pendapatan lainnya, maka akan semakin kinerja keuangannya.¹²

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Teori tersebut sejalan dengan penelitian Indah Puspa Sari bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.¹³ Sedangkan penelitian Dwi Ratnasari dan Dianita Meirini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.¹⁴ Hal tersebut menyebabkan adanya hasil yang tidak konsisten.

Dana Perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, dana

¹² Ahmad Yani, “*Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 51

¹³ Sari, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra),” *JOM Fekon* 3, no. 1 (2016): 679–692.

¹⁴ Ratnasari and Meirini, “Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Silpa Dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan,” *Jurnal Akuntansi* 17, no. 1 (2023): 38–47, <https://doi.org/10.37058/jak.v17i1.6737>.

perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Apabila pengeluaran daerah untuk membiayai jalannya pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat lebih besar dari pendapatan yang dihasilkan daerahnya sendiri, maka pemerintah daerah bisa menggunakan dana dari pemerintah pusat yaitu dana keseimbangan untuk menutupi kekurangan tersebut.

Dana keseimbangan yang utama mempengaruhi kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kedua ini merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat dalam rangka menjalankan desentralisasi fiskal pada daerah-daerah yang dinaunginya.¹⁵ Teori tersebut sejalan dengan penelitian Afia Maulina, dkk bahwa dana keseimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.¹⁶ Sedangkan penelitian Novita Iswani, dkk menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.¹⁷ Hal tersebut menyebabkan adanya hasil yang tidak konsisten.

Belanja modal yang benar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun guna meningkatkan pelayanan kepada

¹⁵ Fadillah Amin, “*Penganggaran Di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*”, Cetakan Pertama (Malang: UB Press, 2019), hal 67

¹⁶ Maulina et al., “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research (JISAMAR)* 5, no. 2 (2021): 390-399

¹⁷ Niswani et al., “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020,” *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)* 1, no. 1 (2022): 64–78, <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>.

masyarakat. Semakin besar belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja daerah, maka akan semakin baik pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya dapat terlihat dari pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang dijalankan. Hal ini merujuk pada seberapa besar pemerintah daerah menggunakan dananya untuk belanja modal sebagai langkah meningkatkan produktivitas jangka panjang.¹⁸

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan maka hasilnya pun akan semakin banyak.¹⁹ Teori tersebut sejalan dengan penelitian Yuliasti Leki, dkk bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.²⁰ Sedangkan penelitian Vidia Utami Putri, dkk menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.²¹ Hal tersebut menyebabkan adanya hasil yang tidak konsisten.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis besarnya pendapatan asli daerah,

¹⁸ Halkadri Fitra, “*Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*”, Cetakan Pertama, (Malang: CV IRDH, 2019), hal. 246

¹⁹ Mulia Andirfa, “*Kinerja Keuangan Daerah: Suatu Kajian Terkait Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh*”, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hal. 37

²⁰ Leki et al., “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 5 (2018): 164–74.

²¹ Putri, Prasetya, Widyowati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016-2021,” *Jurnal AKuntansi Pratama (JATAMA)* 1, no. 3 (2024): 1-12

dana perimbangan dan belanja modal pada suatu tahun dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun berikutnya. Maka penulis tertarik membuat suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Di Jawa Timur Tahun 2018 – 2023”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang yang diuraikan diatas dapat diidentifikasi masalah – masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Menurunnya anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya.
2. Kurangnya usaha dalam pengelolaan serta pemungutan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki.
3. Masih besarnya pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dalam total pendapatan daerah.
4. Diperlukannya pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah atas pencapaian dari pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu sebagai evaluasi berkala dan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kota di Jawa Timur tahun 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kota di Jawa Timur tahun 2018-2023?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kota di Jawa Timur tahun 2018-2023?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal bersama-sama secara parsial dan simultan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kota di Jawa Timur tahun 2018-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kota di Jawa Timur tahun 2018-2023.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kota di Jawa Timur tahun 2018-2023.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kota di Jawa Timur tahun 2018-2023.

4. Untuk menguji dan menjelaskan secara simultan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kota di Jawa Timur tahun 2018-2023.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi beberapa pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis terhadap kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dilakukan guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi, selain itu penelitian ini digunakan sebagai instrumen untuk mempraktikkan dan menerapkan ilmu serta teori yang didapat selama masih dalam masa kuliah. Observasi ini diharapkan juga menjadi penambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang langkah-langkah menganalisa informasi keuangan di anggaran pendapatan dan belanja modal.
- b. Bagi Masyarakat, harapannya penelitian ini mampu menjadi acuan bagi masyarakat guna memahami bagaimana kinerja keuangan

Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dan bebas berpendapat serta memberi masukan dan kritik serta saran yang membangun Pemerintah Daerah guna memperbaiki manifestasi keuangan dan kualitas publik service agar lebih berkualitas.

- c. Bagi Instansi, diharapkan penelitian ini mampu menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah pada Kota di Provinsi Jawa Timur dalam memberi penilaian dan memantau kinerja keuangan dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat termotivasi dan tergugah untuk terus melakukan peningkatan kinerja keuangan dan pelayanan yang lebih baik guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah

Ruang lingkup dan keterbatasan masalah digunakan untuk menjaga dari kemungkinan adanya kekaburan atau melebarnya pemahaman yang sesuai dengan tujuan utama dari judul penelitian ini.

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal yang menjadi variable bebas (X), dan menggunakan Kinerja Keuangan yang menjadi variable terikat (Y). Penelitian ini difokuskan pada pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023.

2. Batasan Masalah

- a. Penelitian ini terfokus pada variable independen (X) yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Dana Perimbangan(X2), dan Belanja Modal (X3). Sedangkan variable dependen (Y) yaitu Kinerja Keuangan.
- b. Objek dalam penelitian ini hanya dilakukan (dibatasi) pada pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023.
- c. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018-2023. Data tersebut diperoleh dari website <https://dpjk.kemenkeu.go.id>.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah.²²
- b. Dana Perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.²³

²² Damas Dwi Anggoro, “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”, (Malang: UB Press, 2017), hal. 18

²³ Nurlan Darise, “*Akuntansi Keuangan Daerah*”, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), hal.137

- c. Belanja Modal, merupakan belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tertentu. Alokasi belanja modal ini akan meningkatkan sarana penunjang aktifitas masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat.²⁴
- d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya system pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintahan pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.²⁵

2. Definisi Operasional

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, yang dimaksudkan PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada

²⁴ Deddi Nordiawan, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 45

²⁵ Ibnu Syamsi, “*Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*”, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 199

daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

- b. Dana Perimbangan, merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah.²⁶
- c. Belanja Modal, mencakup pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan kualitas aset. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, belanja modal diakui ketika terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.²⁷
- d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur melalui berbagai indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Indikator ini mencakup rasio-rasio keuangan seperti rasio ketergantungan, rasio efektivitas,

²⁶ Fadillah Amin, “*Penganggaran Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*”, (Malang: UB Press, 2019), hal. 67

²⁷ Nordiawan Deddi, “*Akuntansi Pemerintahan*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 187

rasio efisiensi, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam mencapai target-target keuangan yang telah ditetapkan.²⁸

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi dengan penelitian kuantitatif dapat dibagi menjadi 3 bagian antara lain sebagai berikut:

1. **Bagian Awal**, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahaan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
2. **Bagian Utama**, merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas landasan teori, terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Bab ini juga membahas mengenai unsur-unsur yang terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

²⁸ Abdul Halim, "Akuntansi Keuangan Daerah", (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 78

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi , sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulam data dan teknik analisis data. konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan dan perhitungan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan yang membahas hasil dari penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

3. **Bagian Akhir**, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.